

TESIS

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS UNTUK
MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU
BERDASARKAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
NOTARIS**



Disusun Oleh:

Siti Maimunah Syaputri

NIM. 2220216320063

**Program Studi Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin
2024**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS UNTUK
MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU
BERDASARKAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
NOTARIS**

Tesis

**Untuk memperoleh gelar Magister
Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana
Universitas Lambung Mangkurat**

Disusun Oleh:

Siti Maimunah Syaputri

NIM. 2220216320063


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2024**

Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Diuji
Pada Tanggal 28 Juni 2024

PEMBIMBING


Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 1979100 2200501 1 001

Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan


Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2002

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Maimunah Syaputri, S.H.

NIM : 2220216320063

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Judul Tesis : TANGGUNG JAWAB NOTARIS UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU BERDASARKAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiarisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah dijadikan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau penetapan yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 5 Juli 2024
Yang membuat pernyataan



Siti Maimunah Syaputri, S.H.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PROGRAM PASCASARJANA**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 481/UN8.4/SE/2024

Sertifikat ini diberikan kepada:

Siti Maimunah Syaputri

Dengan Judul Tesis :

Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$, dan dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarnasin, 06 Agustus 2024

Rektor,



Prof. Dr. H. Bambang Biyatmoko, M.Si.

NIP 196805071993031020



Usulan Penelitian Tesis ini
telah Dinilai di Depan Sidang
Panitia Penilai Ujian Tesis
pada Jumat, 28 Juni 2024

Susunan Panitia Penilai

Ketua : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S. H., M. H.
Sekretaris : Dr. Saprudin, S. H., LL.M.
Anggota : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

RINGKASAN

TANGGUNG JAWAB NOTARIS UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU BERDASARKAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

oleh:

Siti Maimunah Syaputri, S.H.¹ Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H,
M.Kn.²

Studi Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 109 Halaman

Email : syaputriputri537@gmail.com

Jabatan Notaris sangat diperlukan oleh masyarakat dalam perbuatan hukum, sehingga kedudukan Notaris menjadi semakin penting. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya, Notaris memiliki hak atas honorarium. Artinya orang yang telah menggunakan jasa Notaris wajib membayar honorarium, meskipun demikian Notaris berkewajiban pula untuk membantu secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu memberikan honorarium kepada Notaris. Notaris berhak menentukan nilai ekonomis sendiri berdasarkan pertimbangannya asalkan tidak melebihi ketentuan maksimal yang diatur dalam UUJN. Notaris sebagai pejabat umum tidak mendapatkan honorarium dari negara namun mendapatkan honorarium dari masyarakat atas pelayanan jasa hukum yang diberikannya. Penggunaan pelayanan jasa hukum notaris oleh masyarakat yang mampu, dapat dilakukan dengan memberikan honorarium kepada notaris, sedangkan masyarakat yang tidak mampu tidak dapat memberikan honorarium kepada notaris. Perbedaan perekonomian tersebut berdampak pada penggunaan pelayanan jasa hukum notaris. Notaris tidak boleh menolak klien yang datang membutuhkan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UUJN, notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Berdasarkan pasal tersebut menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu dapat mendapatkan pelayanan jasa hukum notaris secara cuma-cuma.

Penelitian ini meneliti mengenai pengaturan tanggung jawab notaris untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu; dan meneliti mengenai sanksi terhadap notaris yang tidak mau melayani masyarakat yang tidak mampu. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Sifat penelitian ini adalah preskriptif analitis, yaitu bertujuan mendapatkan jalan keluar untuk memecahkan masalah-masalah yang diteliti sehingga memberikan kesimpulan serta saran pada akhir penelitian ini. Tipe penelitian ini adalah doktrinal research, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis terhadap bahan

¹ 2220216320063

² Pembimbing

hukum yang dihimpun. Adapun bahan hukum yang digunakan, diantaranya: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memberikan kewajiban kepada notaris untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dan disertai dengan ancaman sanksi jika notaris menolak untuk memberikan bantuan hukum kenotariatan kepada masyarakat tidak mampu. Tanggungjawab notaris ini diulang dalam ketentuan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris Indonesia. Namun belum ada ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi seseorang dapat dinyatakan termasuk ke dalam golongan masyarakat yang tidak mampu, dan sejauh mana bantuan hukum kenotariatan tersebut harus diberikan oleh notaris. Adapun sanksi terhadap Notaris yang tidak mau melayani masyarakat yang tidak mampu, diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dimana sanksi tersebut berupa: peringatan lisan; peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian dalam Kode Etik Notaris Indonesia juga mengatur sanksi dalam Pasal 6 angka 1, yang terdiri dari: teguran; peringatan; pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan; pemberhentian dengan hormat dari anggota Perkumpulan; atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN
KEPADA MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU BERDASARKAN
PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN NOTARIS**

oleh:

Siti Maimunah Syaputri, S.H.³ Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H, M.Kn.⁴

Studi Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 109 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu, Notaris

Notaris mendapatkan honorarium atas pelayanan yang diberikannya. Namun dalam melayani masyarakat yang tidak mampu, notaris tidak akan menuntut honorarium sebagaimana biasanya. Notaris tidak boleh menolak klien yang membutuhkan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UUJN, dimana notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tanggung jawab notaris untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu; dan untuk mengetahui sanksi terhadap notaris yang tidak mau melayani masyarakat yang tidak mampu. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *Pertama*, Pasal 37 UUJN mewajibkan notaris untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dan disertai dengan ancaman sanksi jika notaris menolak memberikan bantuan hukum tersebut. Tanggungjawab notaris ini diulang dalam ketentuan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris Indonesia. Namun belum ada ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi seseorang dapat dinyatakan termasuk ke dalam golongan masyarakat yang tidak mampu, dan sejauh mana bantuan hukum kenotariatan tersebut harus diberikan oleh notaris. *Kedua*, Sanksi terhadap Notaris yang tidak mau melayani masyarakat yang tidak mampu, diatur Pasal 37 ayat (2) UUJN, dimana sanksi tersebut berupa: peringatan lisan; peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian dalam Kode Etik Notaris Indonesia juga mengatur sanksi dalam Pasal 6 angka 1, yang terdiri dari: teguran; peringatan; pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan; pemberhentian dengan hormat dari anggota Perkumpulan; atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

³ Siti Maimunah Syaputri

⁴ Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H, M.Kn

**NOTARY'S RESPONSIBILITY TO PROVIDE SERVICES TO LESS
AFFLUENT SOCIETY BASED ON ARTICLE 37 OF ACT
NUMBER 2 OF 2014 CONCERNING NOTARY POSITION**

By
Siti Maimunah Syaputri¹, Anang Shophan Tornado²
Master of Notary Study Program, Lambung Mangkurat University, 109 pages

ABSTRACT

Keywords: *Legal Aid, Less Affluent Society, Notary*

This research is aimed at studying the regulation on notary's responsibility to provide services to the less affluent society, and to study the sanction to a notary who does not want to serve the less affluent society. Type of this research is normative legal research, using statute approach and conceptual approach. The results of the research indicate that *firstly*, Article 37 of Notary Position Act obliges a notary to provide services to the less affluent society and with the threat of a sanction of the notary refuses to provide the said legal aid. This notary's responsibility is repeated in Article in the provision of Article 3 number 7 of Code of Ethics of Indonesian Notaries. But there is not yet further provision on the qualification of a person who can be declared as the less affluent society, and how far the notarial legal aid must be provided by the notary. *Secondly*, sanction to a notary who does not want to serve the less affluent society is regulated in Article 37 paragraph (2) of Notary Position Act, in which the sanctions can be the form of: oral warning, written warning, temporary dismissal, honorable dismissal, or dishonorable dismissal. Besides, in Code of Ethics of Indonesian Notaries also regulates sanction in Article 6 number 1 which consists of reprimand, warning, temporary dismissal from association membership, honorable dismissal from association membership or dishonorable dismissal from association membership.

Certified by,



¹ Student number: 2220216320063

² Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil Karya Sederhana Ini Penulis Persembahkan Kepada:

**Alm. Mama Tersayang,
Ayah Tersayang,
Adik Tersayang,
Seluruh Keluarga Besar**

*Terimakasih kepada Alm. Mama tersayang, Ayah tersayang,
Adik tersayang, dan seluruh keluarga besar*

Atas segala doanya yang tercurah untuk penulis, memberikan semangat dan dukungan, serta nasihat kepada penulis. Selalu mengiringi di setiap perjalanan penulis, dan mendorong penulis untuk bisa menyelesaikan pendidikan sejak kecil hingga strata 2 di Magister Kenotariatan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang mengambil judul : Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung hingga dapat terselesaikannya penulisan Tesis ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada:

1. Orang Tua yang saya cintai dan saya banggakan. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Ayah saya yang selalu mengupayakan serta mendorong saya untuk menyelesaikan tesis ini, dan almarhumah Mama yang sudah berada di syurga dan bangga kepada si penulis yang tak sempat melihat putrinya meraih gelar Sarjana hingga Magister.
2. Saudara Perempuan yang saya sayangi Siti Aisyah Nazwa Julianti, keluarga besar saya apalagi nenek saya tercinta Hj. Yati yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dukungan agar kuat dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

5. Bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini.
6. Bapak alm. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.; dan Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S. H., M. H.; dan juga Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji Pendamping yang membimbing, memberikan arahan dan masukan serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
8. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
9. Direktur Utama PT. JAMKRIDA KALSEL Bapak Dr. Suyanto, MM., CFP., CRGP. dan Direktur Bisnis PT. JAMKRIDA Kalsel serta seluruh karyawan atau anak magang PT. JAMKRIDA KALSEL yang mendukung dan membantu banyak serta memotivasi dalam penulisan tesis ini.
10. Kakak tingkat yang sangat membantu dan mengarahkan dalam tesis saya terutama Oktarina Sarare, S.H. yang telah memberikan saran-saran dalam penulisan tesis ini serta memberikan support dan semangat dalam pengerjaannya.
11. Teman Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2022, diantaranya: Angy Indah Noviani, S.H.; Karesya Rezkia Pasha, S.H.; Tarisya Eka Damayanti, S.H.; Annisa Nurul Tasya, S.H.; Leni. S.H.; Meinda Berliani, S.H.; dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis.

12. Teruntuk seseorang yang spesial yang dari kejauhan telah menjadi salah satu penyemangat, pendengar keluh kesah dalam penulisan tesis, penasehat yang baik dan senantiasa memberikan doa.
13. Teruntuk Sahabat Terdekat Penulis yaitu Susi, Rizka, Tasya Bontang, Elvina, Hesty, dan Amel atas segala motivasi yang memberikan semangat kepada Penulis dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini yang selalu berada di balik layar, kebersamai dalam perjuangan penulis, dan selalu mau direpotkan oleh penulis.
14. Diri saya sendiri, terimakasih sudah bertahan dan tidak menyerah sampai di titik sejauh ini.

Penulis berharap semoga penelitian yang berbentuk tesis ini dapat bermanfaat untuk setiap orang yang membacanya, dan dapat menjadi bahan akademis dalam penelitian-penelitian mahasiswa selanjutnya. Penulis menyadari bahwa di dalam penelitian ini masih terdapat begitu banyak kekurangan, baik dari segi materi substansinya maupun dari segi penulisannya. Sehingga penulis sangat terbuka jika ada masukan dan saran yang membangun agar dapat menjadi koreksi jika penulis melakukan penelitian-penelitian lainnya di masa mendatang.

Banjarmasin, Juni 2024
Penulis,

Siti Maimunah Syaputri, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN PRASYARAT.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SETELAH SIDANG TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	v
SUSUNAN PANITIA PENILAI.....	vi
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	48
G. Sistematika Penulisan.....	52
BAB II TANGGUNG JAWAB NOTARIS UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU BERDASARKAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS.....	53
A. Kewajiban Notaris dalam Melaksanakan Pekerjaannya.....	53

B. Pelayanan Notaris Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu.....	67
BAB III SANKSI UNTUK NOTARIS YANG TIDAK MAU MELAYANI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU.....	85
A. Alasan Notaris Tidak Mau Melayani Klien yang Menghadap.....	85
B. Sanksi Untuk Notaris yang Menolak Melayani Masyarakat yang Tidak Mampu.....	94
BAB IV PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	